

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat penurunan pendapatan riil masyarakat yang terutama terjadi pada periode perlambatan ekonomi nasional tahun 2020–2021, ketika pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi aktivitas ekonomi dan menurunkan daya beli rumah tangga. Penurunan pendapatan riil tersebut berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehingga standar hidup layak sulit tercapai dan taraf kesejahteraan semakin menurun (Surbakti et al., 2023).

Kemiskinan didefinisikan kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak, seperti yang umumnya dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan fisik, yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti nutrisi, perumahan, kesehatan, dan Pendidikan (Umam & Furqon, 2024). Manifestasi kemiskinan mencakup kelaparan, buta huruf, buruknya akses kesehatan, kondisi perumahan di bawah standar, serta kerentanan terhadap degradasi lingkungan dan ancaman keamanan (Sianturi et al., 2021).

Kemiskinan dan arah pembangunan bangsa memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat diabaikan. Pembangunan yang ideal adalah yang secara menyeluruh mengintegrasikan upaya pengentasan kemiskinan dengan pola pembangunan nasional (Todaro & Smith, 2015). Pembangunan nasional bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif guna menciptakan

kesempatan kerja yang layak serta meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat. Sasaran ini diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang merata bagi penduduk Indonesia. Salah satu fokus utama dalam agenda pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan, mengingat kemiskinan merupakan permasalahan struktural yang mendasar dalam sistem perekonomian nasional. Kemiskinan, sebagai masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional,

Kemiskinan di Jawa Timur merupakan isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di provinsi ini mencapai 3.982,69 ribu jiwa, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu 4.188,81 ribu jiwa (BPS Jatim, 2025).

Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat efektivitas implementasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dirancang dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan masih ada, terutama di beberapa kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Pulau Madura Tahun 2010-2024 (ribu jiwa)

Tahun	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	Rata-rata di Jawa Timur
2010	255.6	285.5	179.2	256.7	227.41
2011	239.5	267.5	167.9	242.5	126.74
2012	229.8	253.4	160.3	232.2	121.08
2013	218.3	248.2	153.1	225.5	119.03
2014	212.2	239.6	148.7	218.9	115.55
2015	216.23	240.35	146.9	216.84	116.72
2016	205.71	227.8	142.3	216.14	115.03
2017	206.53	225.13	129.4	211.94	112.81
2018	191.33	204.82	137.1	218.6	105.65
2019	186.11	202.21	137.7	211.98	99.69
2020	204	224.74	126	223.2	107.08
2021	215.97	237.23	126.4	224.73	110.52
2022	196.11	217.97	125.8	206.2	101.02
2023	196.66	221.71	122.4	206.1	101.11
2024	190.94	214.32	123.4	196.42	95.81

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2010–2024, jumlah penduduk miskin di empat kabupaten di Pulau Madura Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep secara konsisten berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur sepanjang periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah Madura relatif lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

Kabupaten Sampang tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Madura hampir setiap tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Sampang mencapai 285,5 ribu jiwa, kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai 237,23 ribu jiwa pada tahun 2021, dan menurun menjadi 214,32 ribu jiwa pada tahun 2024.

Kabupaten Bangkalan juga menunjukkan jumlah penduduk miskin yang tinggi, yaitu 255,6 ribu jiwa pada tahun 2010, meskipun cenderung menurun dalam jangka panjang menjadi 190,94 ribu jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, Kabupaten Sumenep mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 256,7 ribu jiwa pada tahun 2010, dan meskipun mengalami fluktuasi selama periode penelitian, jumlahnya menurun menjadi 196,42 ribu jiwa pada tahun 2024.

Berbeda dengan tiga kabupaten lainnya, Pamekasan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling rendah di Pulau Madura sepanjang periode 2010–2024. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Pamekasan tercatat sebesar 179,2 ribu jiwa, dan secara bertahap menurun hingga mencapai 123,4 ribu jiwa pada tahun 2024. Secara umum, data menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin di seluruh kabupaten Madura dalam jangka panjang, meskipun nilainya masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur, yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 95,81 ribu jiwa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan di pulau Madura masih menjadi tantangan besar dengan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor seperti kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, rendahnya kualitas pendidikan, dan terbatasnya lapangan kerja menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan tersebut (Faradila & Imaningsih, 2022).

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Pulau Madura, yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, menunjukkan bahwa wilayah ini masih menghadapi tantangan sosial ekonomi yang cukup serius. Keempat kabupaten di Madura termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Timur, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam upaya pembangunan wilayah.

Peningkatan angka kemiskinan secara signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu ketika pandemi COVID-19 melambatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mengganggu sektor produksi dan distribusi, serta menurunkan pendapatan rumah tangga. Dampak ini dirasakan secara merata oleh seluruh kabupaten di Madura, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2020–2021.

Meskipun demikian, dinamika kemiskinan di setiap kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Kabupaten Sampang dan Bangkalan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dua kabupaten lainnya. Sementara itu, Pamekasan dan Sumenep menunjukkan tren perbaikan yang lebih stabil, meskipun tetap berada pada level yang cukup tinggi.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Pulau Madura tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pandemi, tetapi juga oleh persoalan struktural seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterbatasan lapangan kerja, ketergantungan pada sektor informal, serta pemerataan

pembangunan yang belum optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih fokus dan berkelanjutan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab utama kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan adalah masalah yang perlu segera diatasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanggulangnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pemberian bantuan sosial. Namun, pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada program-program tersebut, melainkan juga pada pemahaman faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti Pendidikan dan jumlah penduduk (Suryahadi et al., 2020).

Pendidikan, sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya memperluas pengetahuan tetapi juga meningkatkan keterampilan kerja, produktivitas, dan kesejahteraan individu. Berbagai penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pengurangan kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Susanto dan Pangesti (2019) mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka berada dalam kemiskinan (Susanto & Pangesti, 2019). Selain itu, studi oleh Surbakti, Muchtar, dan Sihombing (2023) menekankan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf berkontribusi signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Surbakti et al., 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Madura (meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) secara umum menunjukkan tren peningkatan, meskipun terdapat disparitas di antara kabupaten. Berikut

merupakan tren peningkatan IPM di pulau Madura yang terjadi sepanjang tahun 2010 hingga 2024:

Tabel 1. 2 IPM Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2010-2024 (dalam Persen)

Tahun	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
2010	57,23	54,49	59,37	57,27
2011	58,63	55,17	60,42	58,70
2012	59,65	55,78	61,21	60,08
2013	60,19	56,45	62,27	60,84
2014	60,71	56,98	62,66	61,43
2015	61,49	58,18	63,10	62,38
2016	62,06	59,09	63,98	63,42
2017	62,30	59,90	64,93	64,28
2018	62,87	61,00	65,41	65,25
2019	63,79	61,94	65,94	66,22
2020	64,11	62,70	66,26	66,43
2021	64,36	62,80	66,40	67,64
2022	65,05	63,39	66,99	68,49
2023	66,82	66,19	70,32	69,13
2024	67,33	66,72	70,85	69,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep (2010–2024).

Berdasarkan Tabel 1.2, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep selama periode 2010–2024 secara umum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun masih terdapat disparitas antar kabupaten. Kabupaten Pamekasan secara konsisten mencatat nilai IPM tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Pulau Madura, yang meningkat dari 59,37 pada tahun 2010 menjadi 70,85 pada tahun 2024 (BPS Pamekasan, 2024). Kabupaten Sumenep juga menunjukkan perkembangan yang relatif stabil, dengan IPM meningkat dari 57,27 pada tahun 2010 menjadi 69,78 pada tahun 2024, mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat (BPS Sumenep, 2024). Sementara itu, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang meskipun mengalami peningkatan IPM dari tahun ke tahun, masih berada pada level yang relatif lebih rendah. IPM Kabupaten Bangkalan meningkat dari 57,23 pada tahun 2010 menjadi 67,33 pada tahun 2024, sedangkan

Kabupaten Sampang mengalami kenaikan dari 54,49 pada tahun 2010 menjadi 66,72 pada tahun 2024 (BPS Bangkalan, 2024; BPS Sampang, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Pulau Madura belum merata, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, khususnya bagi kabupaten dengan capaian IPM yang relatif lebih rendah.

Selain itu, tingginya jumlah penduduk turut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Kondisi ini diperparah dengan tingginya ketergantungan penduduk pada sektor informal yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. kompetensi penduduk usia produktif yang masih rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan industri menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di pulau Madura (Faradila & Imaningsih, 2022).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan yang produktif, selama diiringi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia. Namun, apabila kualitas SDM rendah, peningkatan jumlah penduduk justru berpotensi menjadi beban pembangunan, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat kemiskinan. Peningkatan jumlah penduduk secara langsung memengaruhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta menambah beban pengeluaran pemerintah yang terbatas untuk memenuhi layanan Masyarakat (Putri & Nurwati, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Tingkat Pendidikan, pertumbuhan penduduk, dan kemiskinan di Madura.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Madura?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Madura?
3. Apakah Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Madura
2. Mengkaji pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Madura
3. Mengetahui apakah tingkat pendidikan dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Madura

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, Peneliti berharap bahwa penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut;

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait hubungan antara tingkat pendidikan, jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, dan kemiskinan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji isu ketimpangan, efektivitas belanja publik, dan pembangunan inklusif di wilayah tertinggal.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah Madura, dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk menangani tingkat kemiskinan. Hasil ini dapat digunakan oleh Pemerintah, dan instansi terkait dalam menyusun prioritas anggaran yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.